

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG TRANSPARANSI
ANGGARAN DESA DI DESA MADAPRAMA KECAMATAN
WOJA KABUPATEN DOMPU**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1)
Studi Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH:

YUDIANSAH
NIM. 21513A0069

**KONSENTRASI ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG TRANSPARANSI
ANGGARAN DESA DI DESA MADAPRAMA KECAMATAN WOJA KABUPATEN
DOMPU**



Disusun dan diajukan oleh

YUDIANSAH
NIM:21513A0069

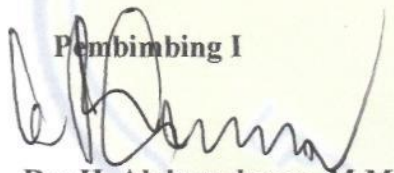
PROGRAM STUDI
STUDI PEMERINTAHAN

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan ke sidang panitia
ujian skripsi pada:

Mataram, 07 Agustus 2019

Menyetujui:

Pembimbing I


Drs. H. Abdurrahman, M.M.
NIDN.0804116101

Pembimbing II


M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.AP.
NIDN.0809039203

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Studi Pemerintahan


F. Syarifuddin Hadi, S.IP., M.IP.
NIDN.0816057902

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG TRANSPARANSI
ANGGARAN DESA DI DESA MADAPRAMA KECAMATAN WOJA KABUPATEN
DOMPU**

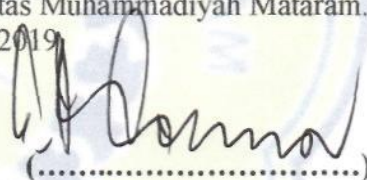

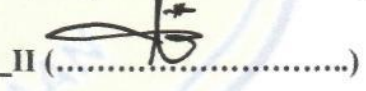


Disusun dan di ajukan oleh

YUDIANSAH
NIM:21513A0069

Skripsi atas nama Yudiansah telah dipertahankan di depan Dosen Penguji Program Study Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Pada hari/tanggal Rabu,07 Agustus 2019

Tim Penguji :

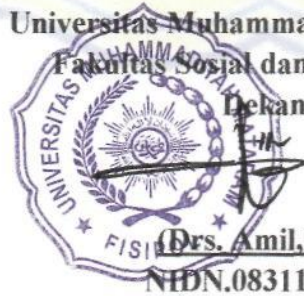
- | | | |
|--|------------|--|
| 1. <u>(Drs.H. Abdurrahman, M.M)</u>
NIDN. 0804116101 | Ketua | 
(.....) |
| 2. <u>(M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP)</u>
NIDN. 0809039203 | Anggota I | 
(.....) |
| 3. <u>(Drs. Amil,MM)</u>
NIDN.0831126204 | Anggota_II | 
(.....) |

Mengetahui

Universitas Muhammadiyah Mataram

Fakultas Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



(Drs. Amil,MM)
NIDN.0831126204

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabulan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, September 2019



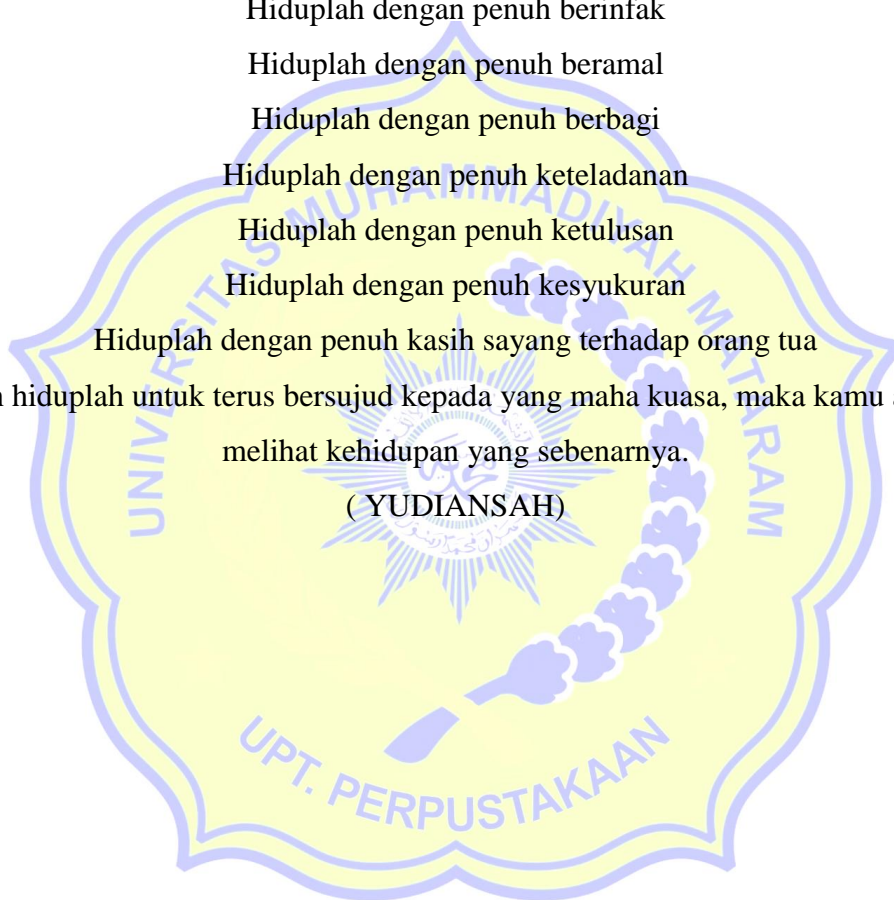
(Yudiansah)
NIM. 21513A0069

MOTTO

Jikalau hidup hanya sekedar untuk hidup, babi dihutan pun juga bisa hidup
Dan jikalau hidup untuk mencari makan, monyet dihutan pun juga bisa mencari
makan.

Hiduplah dengan penuh cinta dan perjuangan
Hiduplah dengan penuh berinfak
Hiduplah dengan penuh beramal
Hiduplah dengan penuh berbagi
Hiduplah dengan penuh keteladanan
Hiduplah dengan penuh ketulusan
Hiduplah dengan penuh kesyukuran
Hiduplah dengan penuh kasih sayang terhadap orang tua
dan hiduplah untuk terus bersujud kepada yang maha kuasa, maka kamu akan
melihat kehidupan yang sebenarnya.

(YUDIANSAH)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah melindungi segenap alam, kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang kusayangi, orang-orang yang kucintai dan beserta teman-teman seperjuangan.

1. Kupersembahkan skripsi ini untuk almarhum Ayahku (Mustamin), untuk Ayahku yang sekarang (Duraja) dan untuk Ibundaku tercinta (Arbia) dan seluruh keluargaku tersayang sebagai wujud baktiku kepada mereka yang selalu membantu, memberikan kasih sayang yang tiada terhingga sehingga sejauh ini merawat, membina dan selalu mendoakan saya untuk menjadi yang terbaik dimasa akan datang.
2. Untuk adiku Suryani dan Lilis Karlina yang tiada bosan-bosannya memberikan motivasi dan dukungan agar selalu tetap untuk cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk kekasih hati tercintaku Indah Sari, A.Md. Kom. beserta orang tuanya yang tiada bosan-bosannya memberikan motivasi dan dukungan untuk selalu kuat dan tegar dalam menjalankan aktifitas demi menyelesaikan skripsi ini.
4. Untuk abang-abangku Gerlys Manggali Wara, Hamba Rastavara, David Anti Koruptor, Dahlan Dewantara, Adfal siregas, Askar Maulana dan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan semangat untuk berjuang demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Untuk teman-temanku Gherynk, Akbar, Irwansyah, Cuek, Haerudin, Doyo, Ahmed, Sabdin dan untuk semua kawan seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi yang luarbiasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kupersembahkan untuk Organisasiku dan Kampusku yang tercinta, terimakasih telah merawatku dengan baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan ridho-nya, sehingga skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis seyogyanya mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. Arsyad A. Gani, M.PD selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Drs. Muhammad Junaidin, M.M sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP, M.IP sebagai Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Drs. H. Abdurrahman, M.M dan Bapak M. Ulfatul Akbar Jafar, S.AP., M.IP sebagai pembimbing, yang telah memberikan saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua saya, orang-orang terdekat ataupun teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang juga telah memberi kontribusi untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Mataram,

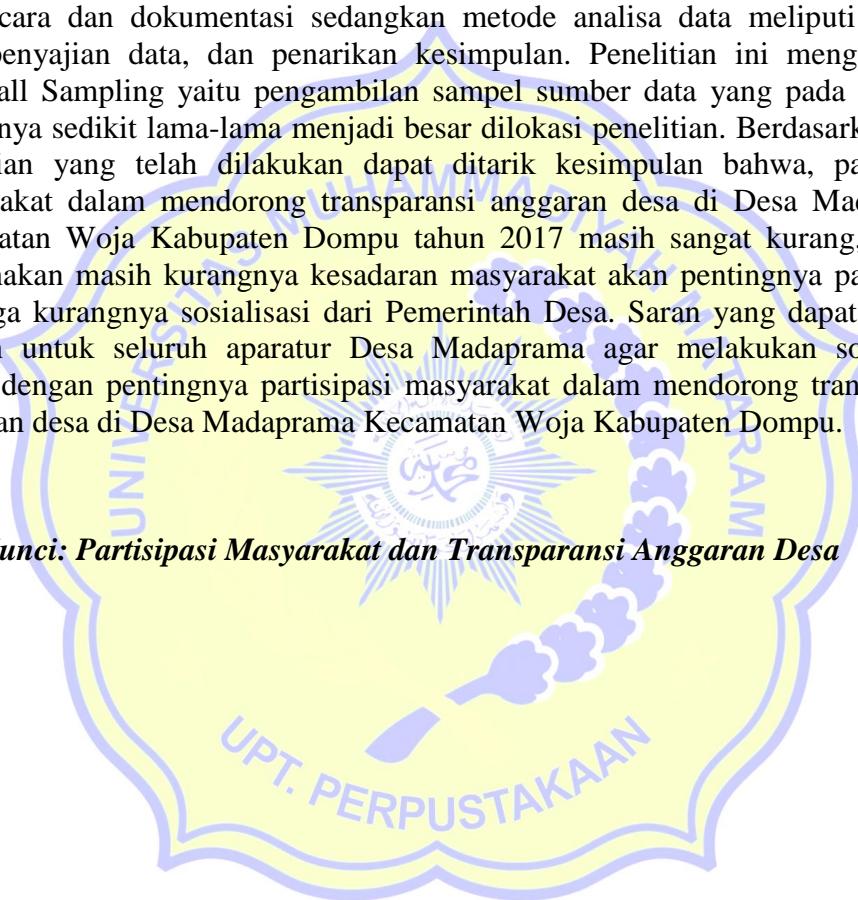
Penulis,

Yudiansah

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Tahun 2017. Partisipasi masyarakat sangatlah penting demi tercapainya suatu kejujuran dalam membahas transparansi anggaran desa. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Madaprana, Bendahara Desa Madaprana dan Masyarakat Desa Madaprana. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi sedangkan metode analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan Snowball Sampling yaitu pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar dilokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa, partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tahun 2017 masih sangat kurang, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dan juga kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Desa. Saran yang dapat peneliti berikan untuk seluruh aparatur Desa Madaprana agar melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

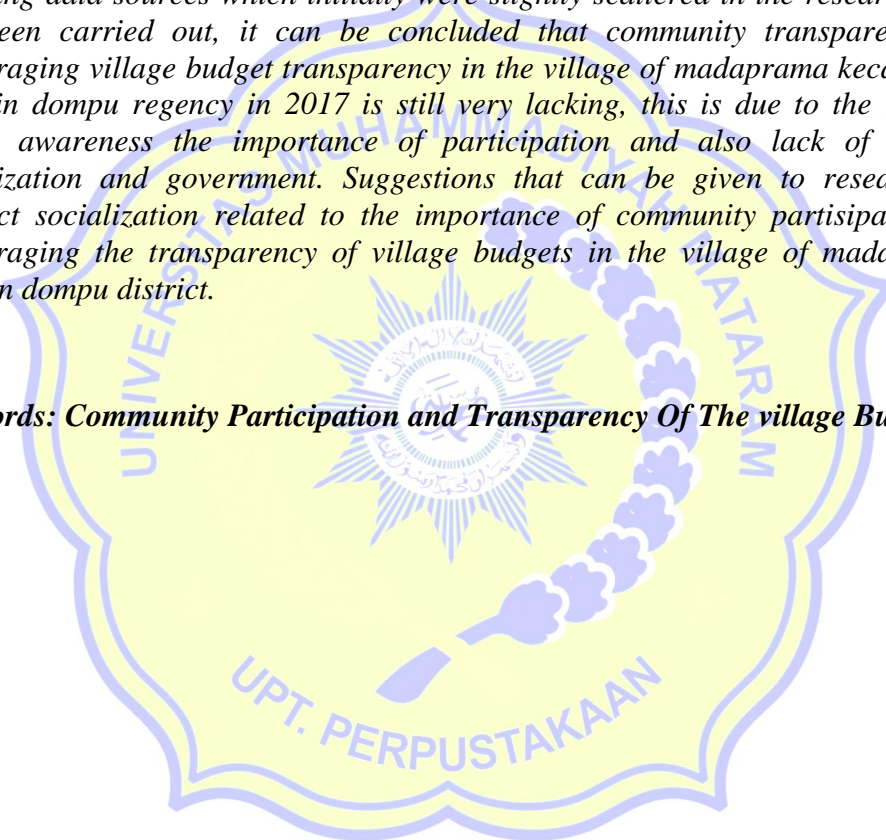
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Anggaran Desa



ABSTRACT

The focus of this study is community participation in encouraging transparency in village budget in the village of kecamatan woja dompu in 2017. Community participation is very important to achieve honesty in discussing village budget transparency. Information in this study was the village head of madaprama, treasurer of the madaprama village and madaprama village community. This research is a type of qualitative research, the method used in this study is descriptive method using a qualitative approach. The method of data collection uses interviews and documentation while data analysis includes data reduction, and conclusions of this study using a snowball sampling. Which is sampling data sources which initially were slightly scattered in the research that has been carried out, it can be concluded that community transparency in encouraging village budget transparency in the village of madaprama kecamatan woja in dompu regency in 2017 is still very lacking, this is due to the lack of public awareness the importance of participation and also lack of village socialization and government. Suggestions that can be given to research of conduct socialization related to the importance of community participation in encouraging the transparency of village budgets in the village of madaprama woja in dompu district.

Keywords: *Community Participation and Transparency Of The village Budget.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Teori.....	13
2.2.1 Pengertian Partisipasi	13
2.2.2 Bentuk dan Jenis Partisipasi	17
2.2.3 Faktor-Faktor Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat	20
2.3 Transparansi	21
2.3.1 Pengertian Transparansi	21
2.3.2 Prinsip-Prinsip Transparansi	27
2.3.3 Indikator Transparansi	29
2.4 Kerangka Berpikir	30
2.5 Devinisi Konseptual	31

2.6 Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
3.1.1 Pendekatan penelitian.....	33
3.1.2 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Lokasi Penelitian.....	34
3.3 Teknik Penentuan Informan.....	34
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4.1 Jenis Data.....	35
3.4.2 Sumber Data.....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.6 Teknik Analisa Data.....	39
3.7 Keabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	43
4.1.1 Letak wilayah.....	43
4.1.2 Kondisi kependudukan.....	44
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu?.....	46
4.2.2 Apa faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam mendorong tranparasi anggaran desa di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu?.....	67
4.2.2.1 Fakor Penghambat.....	67
4.2.2.2 Faktor pendukung.....	72
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir31



DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Sumber Data.....	37
4.I Luas Wilayah Desa Madaprama Berdasarkan Pemanfaatannya	43
4.II Jumlah Penduduk Desa Madaprama Menurut Jenis Kelamin.....	44
4.III Jumlah Penduduk Desa Madaprama Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	44
4.IV Komposisi Penduduk Menurut Sektor Jenis Mata Pencaharian.....	45
4.V Tingkat Kendala Kehadiran Masyarakat Dalam Kegiatan Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama.....	61
4.VI Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017	65



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran Desa, merupakan kesukarelaan anggota masyarakat untuk melibatkan diri dalam kegiatan transparansi atau dalam kegiatan pembangunan di Desa. Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan tanggungjawab. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga Negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi. Sejak tahun 1999 dikeluarkan berbagai instrument hukum berupa undang-undang dasar (UUD) atau peraturan pemerintah (PP) yang membuka lebar ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kebijakan publik dan monitoring pembangunan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan secara substansi menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah dan berguna untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin, keterbukaan, akuntabilitas dan kepentingan umum, mendapatkan aspirasi masyarakat, dan sebagai wahana untuk agregasi kepentingan dan mobilitasi dana.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Undang-undang yang lebih khusus mengenai Desa, menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1). Kesimpulannya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Implementasi otonomi daerah bagi Desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah Desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban Desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran Desa salah satunya adalah dengan cara pelaporan. Pelaporan dana Desa harus transparan dan akuntabel agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Berdasarkan hal tersebut, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai

kondisi sosial dan budaya termasuk dalam pengaturan keuangan. penyelenggaraan pemerintahan Desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan Desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan Desa baik ditingkat nasional hingga daerah. Kewenangan daerah untuk mengatur proporsi anggaran pembangunan Desa sangat penting sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat Desa.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain pendapatan Desa yang sah (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014).

Pendapatan dana Desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana Desa atau selanjutnya disingkat ADD adalah dana berasal dari APBD kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Sepanjang tahun 2017 melalui penelitian awal oleh peneliti tidak pernah dilakukan sosialisasi terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprana, sehingga bisa dipastikan penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah Desa. Hal ini bisa juga dilihat dari penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pemalsuan data oleh Pemerintah Desa Madaprana, sehingga memicu aksi demonstrasi oleh pemuda dan masyarakat setempat. Dilihat dari aspek itu, Kepala Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, ia ditahan oleh Kejaksaan Negeri Dompu dalam kasus pemalsuan data yaitu pemalsuan tanda tangan pencairan anggaran dana desa. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya Pengadilan Negeri (PN) Dompu menjatuhkan hukuman vonis 1 bulan 27 hari terhadap Kepala Desa (Kades) Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) Dalam sidang putusan yang berlangsung pada Kamis (7/9/17), selama menjalani proses persidangan Kepala Desa Madaprana ia dari penyelidikan, penuntutan dan vonis hakim di Pengadilan Negeri Dompu. Membenarkan dan mengaku bersalah, karena semua itu untuk kepentingan cairnya anggaran untuk pembangunan Desa Madaprana, (Media NTB, Kamis tanggal 07/09/2017).

Maka dari itu peneliti ingin mencari gambaran yang jelas tentang tingkat partisipasi masyarakat dan mencari solusi bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama dan faktor apa saja yang mempengaruhi dan menghambat partisipasi masyarakat dalam proses transparansi anggaran desa di Desa Madaprama, supaya tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa.

Akuntabilitas dalam pemerintah Desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto (dalam Sumpeno, 2011:222) melibatkan kemampuan pemerintah Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan Desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Alokasi Dana Desa merupakan lanjutan dari program bantuan Desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan Desa. Sejak otonomi daerah ADD dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012:80). Jadi, semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Sebaliknya, jika pengelolaan ADD rendah maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran

Desa itu sangat di butuhkan dan diperlukan, supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan anggaran Desa oleh pemerintah Desa.

Banyak kasus mengenai penyelewengan atau pelanggaran mengenai pelaporan keuangan dana Desa salah satunya adalah kasus di Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Kepala Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, ia diduga melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015-2016 yang merugikan negara sebesar Rp 520 juta, (detiknews, Jumat 06 April 2018, 09:36 WIB). Kasus serupa terjadi di Desa Rababaka Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, kepala desa tersebut ia diduga pada Rabu (14/12/2016) ditahan oleh kejaksaan negeri dompu dalam kasus dugaan korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp 130 juta (Bimakini, Rabu 14 Desember 2016).

Hasil penelitian teguh (2015) tentang akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas finansial dalam pengelolaan ADD mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan didepan seluruh pihak pemerintah Desa, namun belum dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Fakta dilapangan selama ini pertanggungjawaban dan pelaporan mengenai dana desa yang berada di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu

belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Masyarakat desa tidak mau terlalu jauh turut campur dalam urusan pemerintahan, hal itu di karenakan mereka tidak memahami dalam urusan pemerintahan atau sengaja tidak mau ambil pusing. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi anggaran Desa hanya selesai pada tahap perencanaan itupun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksa dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi ditingkat lebih rendah (Desa) kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrembang Desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, untuk mendukung perkembangan Desa untuk lebih baik. Maka dari itu dibutuhkan akuntabilitas pengelolaan pelaporan dana Desa yang tepat dan akurat dari aparatur Desa, serta harus menjalin komunikasi yang baik antara elemen yang berkepentingan (masyarakat dan aparatur Desa). Fungsi kontrol ini sangat penting untuk melihat sejauhmana partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran Desa dan sejauhmana transparansi pengelolaan keuangan pemerintah Desa selama satu tahun berjalan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, penulis sebagai mahasiswa Program Studi Pemerintahan tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah kabupaten, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai transparansi anggaran desa.
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui transparansi anggaran desa.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintah Desa dan transparansi anggaran desa sekaligus sumber bahan baru dalam studi pemerintahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Penelitian terdahulu ini intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu, Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Satria Mentari Tumbel dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan”. Variabel penelitian; Variabel independen Partisipasi Masyarakat (X), dilihat dari: Konsep Partisipasi; (1) Tahap pengambilan keputusan. (2) Tahap pelaksanaan. (3) Tahap menikmati hasil (4) Tahap evaluasi. Dilihat dari:Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. (1) Faktor internal. (2) Faktor eksternal. Variabel dependen Pengelolaan Dana Desa (Y), dilihat dari: Dana Desa; (1) Mekanisme Penyaluran Dana Desa. (2) Penyaluran dana desa dari pusat (RKUN) ke Kabupaten/Kota (RKUD). (3) Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/ Kota (RKUD) ke Desa (RKD). (4) Prioritas Penggunaan Dana

Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan partisipasi masyarakat mengalami penurunan, yang dinilai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan seperti rapat masih sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat adalah staf-staf desa, anggota badan permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa dan diikuti beberapa masyarakat, namun masyarakat yang datang itu-itu saja dalam setiap rapat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan juga masih kurang. Hal ini dilihat dari masyarakat yang ikut bekerja dan yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan tersebut adalah staf-staf Desa. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan juga tidak maksimal dan hasil dari pembangunan tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum disetiap desa. Partisipasi dalam tahapan evaluasi juga tergolong masih sangat rendah, dimana terlihat dalam rapat-rapat evaluasi program hanya sedikit yang mengikuti rapat.

Perbedaan

Penelitian terdahulu meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang partisipasi masyarakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wira Gunawan Tahun 2016 dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga“. Variabel penelitian; variabel independen Partisipasi Masyarakat (X), dilihat dari:Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan; (1) Proses pengambilan keputusan. (2) Partisipasi dalam pelaksanaan. (3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*). (4) Partisipasi masyarakat Desa Selayar dalam evaluasi. dilihat dari: Faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat meningkatkan pembangunan di Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga; (1) Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM). (2) Faktor pekerjaan. Variabel dependen (Y) Pembangunan Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan partisipasi masyarakat mengalami penurunan, yang dinilai dari bahwa tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam tahap pertanggung jawaban pembangunan yang dilakukan oleh desa kepada masyarakat ini tidak hanya terjadi ditahun 2016 saja melainkan sejak dahulu tidak pernah adanya pertanggung jawaban dari

pemerintah desa kepada masyarakat, menurut hasil wawancara wira gunawan kepada pemerintah desa ingin melihat laporan pertanggung jawaban pembangunan pada tahun 2016 pemerintah Desa Selayar memberikan keterangan bahwasanya LPJ Desa Selayar tahun 2016 belum selesai. Dalam pencairan dana ditahun 2017 hanya diketahui oleh pemerintah desa tanpa sepengetahuan masyarakat.

Perbedaan

Penelitian terdahulu meneliti tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Selayar Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga 2016. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang partisipasi masyarakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Refli Pusida dengan judul “ Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud“. Variabel penelitian; Variabel independen Partisipasi Politik Masyarakat (X), dilihat dari: Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa; (1) Faktor kepentingan masyarakat. (2) Faktor sentralisasi

perencanaan pembangunan desa. (3) Faktor pengelolaan program. Variabel dependen (Y) Perencanaan Pembangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah, hal ini disebabkan karena: Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan. Masih terdapat masyarakat yang bersikap apatis atau tidak peduli dengan lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini tergolong suatu hal yang penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dari sosialisasi pemerintah desa. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi musrenbang, dan tingkat ekonomi masyarakat yang relative rendah, sehingga sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan karena waktu mereka digunakan untuk menafkahi keluarga. pembangunan ekonomi masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, yang masih kurang memahami bagaimana pengelolaan dana yang sudah disediakan, karena tingkat ekonomi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik.

Perbedaan

Penelitian terdahulu meneliti tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan. Sedangkan penelitian ini membahas

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Persamaan

Persamaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah membahas tentang partisipasi masyarakat dan sama-sama menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Keit Davis mengutamakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh R. A Santoso Sastropetro (1988: 13) sebagai berikut.

“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, moral dan perasaan didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta turut dalam bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan”

Berdasarkan pendapat di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggungjawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok. Sejalan dengan pendapat di atas, Golden W Allport (Santoso Sastropetro, 1988:12) menyatakan bahwa:

“Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya”

Berdasarkan pernyataan di atas, maka ada tiga buah unsur penting dalam partisipasi yaitu:

1. Partisipasi merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Ketersediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok.
3. Dalam partisipasi harus ada tanggungjawab, unsur tanggungjawab ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan satu sama lain, tetapi akan saling menunjang.

Dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha didalam mendukung program pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Santoso S.Hamidjoyo (1988:67), bahwa partisipasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan.
2. Menerima kembali hasil pembangunan dan tanggungjawab terhadapnya.

3. Partisipasi berarti terwujudnya kreatifitas dan aktifitas.

Berdasarkan ketiga hal tersebut di atas, jelas bahwa masalah partisipasi ini sangat urgent, lebih-lebih dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu partisipasi aktif segenap lapisan dalam pembangunan harus semakin luas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun didalam menerima hasil pembangunan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi masyarakat yang dimaksud oleh penulis, yakni keikutsertaan/keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dengan memberikan sumbangan ide terhadap transparansi anggaran desa atau proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai subyek sekaligus sebagai objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerahnya sendiri, sehingga pembangunan dan transparansi anggaran yang nantinya dilaksanakan didaerah mereka betul-betul seperti yang mereka butuhkan dan yang mereka harapkan.

2.2.2 Bentuk dan Jenis Partisipasi

a. Bentuk-bentuk partisipasi

Selanjutnya Keith Davis (Sastropetro, 1988:55) mengemukakan pula tentang bentuk bentuk partisipasi, yaitu:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan honorinya berasal dari sumbangan individu atau instansi yang berada diluar lingkungan tertentu

(dermawan atau pihak ketiga), dan itu merupakan salah satu partisipasi dan langsung akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dalam pembangunan desa tersebut.

4. Mendirikan proyek yang sifatnya dibiayai secara penuh oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh komuniti dalam rapat desa untuk menentukan anggarannya).
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Bentuk kerja yang disumbangkan oleh masyarakat akan meringankan pembangunan yang diselenggarakan oleh desa tersebut.
6. Mengadakan pembangunan dikalangan keluarga sendiri.
7. Membangun proyek komuniti yang sifatnya otonom.
8. Dalam hal partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa, Ndraha (1982:82) juga mengemukakan tentang bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:
 - 1) Partisipasi dalam bentuk swadaya murni dari masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah desa, seperti jasa/tenaga, barang maupun uang.
 - 2) Partisipasi dalam penerimaan/pemberian informasi.
 - 3) Partisipasi dalam bentuk pemberian gagasan.
 - 4) Partisipasi dalam bentuk nilai pembangunan.
 - 5) Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan operasional pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat luas bahkan dalam hal perumusan, perencanaan, pengawasan, pelaksanaan serta pemanfaatan hasil pembangunan pun perlu

dilibatkan, maupun dalam melakukan transparansi anggaran desa. Pembangunan yang dilakukan dipedesaan harus terpadu dengan pengembangan swadaya gotong royong. Yang dimaksud dengan terpadu disini adalah keterlibatan antar pemerintah dan masyarakat, antara sektor yang mempunyai program pedesaan dengan anggota masyarakat itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh (Sastroetro, 1988:19) bahwa

“Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk swadaya gotong royong merupakan model utama dan potensi yang essensial dalam pelaksanaan pembangunan desa yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi dasar kelangsungan pembangunan nasional.”

b. Jenis-jenis partisipasi

Menurut Davis, seperti yang dikutip oleh Sastropoetro (1988:16), mengemukakan jenis-jenis partisipasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pikiran (Psychological Participation).
- 2) Tenaga (Physical Participation).
- 3) Pikiran dan tenaga (Psychological dan Physical Participation)
- 4) Keahlian (Participation With Skill)
- 5) Barang (Material Participation)
- 6) Uang (Money Participation)

Selanjutnya, Sherry R. Arnsten dalam Suryono (2001:127) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on ladder of citizen participation).Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat disebuah Negara.

2.2.3 Faktor-Faktor Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat, baik berupa factor pendorong maupun factor penghambatnya. Factor pendorong yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Subrata dan Atmaja dalam Sopino (1998:32) adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya interes dan partisipan.
- 2) Hadiah dari suatu kegiatan.
- 3) Adanya keuntungan dari kegiatan.
- 4) Motivasi dari luar.

Selanjutnya terdapat pula factor lain yang dapat mewarnai dan turut berperan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat yaitu pemuka musyawarah/tokoh masyarakat, seperti dikemukakan Mutadi dalam Sopino (1998:33) sebagai berikut:

“Dalam pembangunan masyarakat peranan mereka yang tergolong informal leader sangat besar peranannya. Mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap rakyat desanya. Kadang-kadang suatu program pemerintah dapat gagal karena tidak mengikutsertakan para pemuka masyarakat.”

Dengan demikian dapat diketahui pula bahwa partisipasi masyarakat pun dipengaruhi pula oleh adanya seseorang yang menjadi pendorong atau motivator dalam suatu kegiatan.

2.3 Transparansi

2.3.1 Pengertian Transparansi

Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran desa. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

Menurut Lalolo (2003:13) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintahan dengan rakyat.

Menurut Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga control masyarakat terhadap para pemenang otoritas para pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri dalam Negeri Republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dikatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya dengan transparansi kebohongan sulit untuk disembunyikan (Bawias, 2015).

Menurut Mardiasmo (2006:45), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas dengan pengelolaan sumberdaya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau public. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public (Bappenas dan Depdagri, 2002:18).

Menurut Meutiah Ganie Rahman (2000:151) mengemukakan bahwa transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau public. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi public. Maka dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) (Rahman, 2000:151).

Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut:

- a. Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah'
- b. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya,

- c. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah,
- d. Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan
- e. Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan peraturan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak hendaknya masyarakat sebagai stakeholders dilibatkan secara proporsional. Hal ini disamping untuk mewujudkan transparansi juga akan sangat membantu pemerintah daerah dan DPRD dalam melahirkan Peraturan Daerah yang accountable dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebaran berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen

masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi dikalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas (Pohan, 2000:2-3).

Pada implementasi dipemerintah daerah seringkali terjebak dalam “paradigma produksi” dalam hal penyebarluasan informasi ini seakan akan transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak pamflet suatu program dan menyebarkan kesetiap kantor kepala desa, atau memasang iklan disurat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola pikir ini perlu berubah menjadi “paradigma pemasaran”, yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan memahaminya. Mewujudkan transparansi dalam pelaksanaan administrasi publik sehari-hari, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Pertama, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya-upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data/informasi ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka.
- b. Kedua, pemilihan media yang digunakan untuk menyebarkan informasi dan substansi/materi informasi yang disebarluaskan sangat bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasikan yang dibutuhkan oleh masyarakat

awam sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi non pemerintah, akademisi, dan anggota DPRD, misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada “media modern” seperti televisi dan surat kabar.

- c. Ketiga, seringkali berbagai unsur nonpemerintah misalnya pers, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lebih efektif untuk menyebarkan informasi daripada dilakukan pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai komponen strategis ini menjadi sangat penting.

Dwiyanto (2006) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan jaminannya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Dwiyanto (2006) mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward and easy

toapply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely dan readily available). Oleh karena itu menurut penulis, “transparansi merupakan sebuah keterbukaan dalam menjalankan suatu amanah yang diemban dan dipertanggungjawabkan dalam melakukan segala hal, supaya tidak adanya penyimpangan yang dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan tugas dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.”

2.3.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu:

- a. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
- b. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
- c. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
- d. Laporan tahunan.
- e. Website atau media publikasi organisasi.
- f. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Menurut Mustopa Widjaja (2003:261), prinsip terbuka tidak berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
- b. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur menyusun rencana)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dan lain-lain)
- e. Keterbukaan menerima peranserta masyarakat.

Menurut Kristianten (2006:52) mengemukakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen public
- e. Hak untuk diberikan informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut

yang harus dilakukan pemerintah desa Madaprama kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Dwiyanto (2006:80-81) prinsip transparansi pemerintahan paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut:

- a. Adanya sistim keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah dipahami dari semua proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan public tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat public didalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.3 Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) mengemukakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundangan-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya

- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika tersedia pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disediakan di atas, indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban
- b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c. Keterbukaan proses pengelolaan
- d. Keterbukaan informasi tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

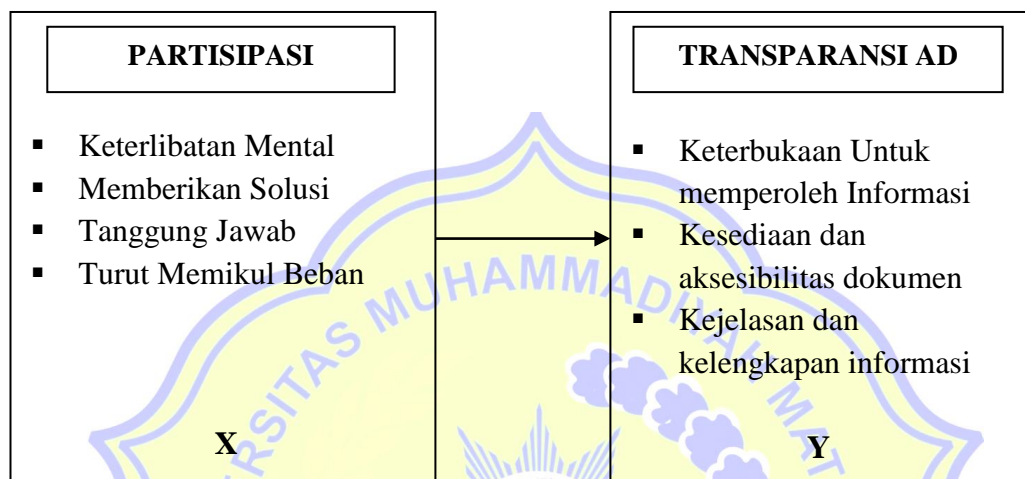
2.4 Kerangka Berpikir

Menurut Sekaran (Sugiyono, 2011:60) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian benar-benar menyusun kerangka berpikir secara ilmiah (memadukan antara asumsi teoritis dan asumsi logika dalam memunculkan variabel) dengan benar, maka peneliti harus intens dan seksameneluri literatur-literatur yang relevan serta melakukan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian

terdahulu yang relevan, sehingga uraian yang dibuatnya tidak semata-mata berdasarkan pada pertimbangan logika.

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir



2.5 Devinisi Konseptual

Variabel X: Definisi partisipasi ?

“Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, memberikan solusi, turut memikul beban, moral dan perasaan didalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha dalam mencapai tujuan serta turut dalam bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.”

Variabel Y: Definisi Transparansi

“Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai dan ketersediaan aksesibilitas dokumen.”

2.6 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk suatu variabel diukur dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seorang penelitian akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Di antaranya adalah:

Variabel X: Partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat diukur dari: keterlibatan mental, tanggung jawab, memberikan solusi, dan turut memikul beban.

Variabel Y: Transparansi anggaran desa.

Transparansi anggaran desa dapat diukur dari: Adanya keterbukaan untuk memperoleh informasi, kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu merupakan kegiatan dari yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data atau peristiwa. Penelitian juga berarti melakukan kegiatan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana sejak persiapan atau perencanaan penyelenggaraan penelitian sampai dengan tersusunya sebuah laporan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (David William, 2006: 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Sedangkan (Bogdan dan Taylor, 2007: 3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penggunaan pendekatan kualitatif ini antara lain didasarkan pada pertimbangan bahwa dengan pendekatan ini dapat membantu peneliti dengan menjelaskan kenyataan-kenyataan yang dihadapi dilapangan. Juga dapat membantu peneliti berinteraksi langsung dengan subjek penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprana Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dipandang dari sifat rancangan penyelidikannya, penelitiannya bersifat deskriptif yaitu penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesa tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau suatu keadaan. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Untuk itu penulis bermaksud menjabarkan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung. Pemilihan suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang baik agar bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, Karena Desa Madaprama merupakan Desa saya sendiri maka dari situlah saya mengambil Desa Madaprama sebagai tempat penelitian saya, karena saya rasa di Desa tersebut tidak terlalu sulit untuk melakukan wawancara, tanya jawab, maupun pengambilan data.

3.3 Teknik Penentuan informan

Sumber data terkait dengan dari siapa, apa, dan dari mana informan mengenai fokus penelitian diperoleh. Dengan kata lain sumber data berkaitan

dengan lokasi dan satuan penelitian atau observasion unit. Jadi sumber merupakan asal-usul dari apa, siapa, dari mana data diperoleh (Muhammad, 2011:154).

Dalam hal ini penulis menggunakan metode Snowball Sampling untuk mendapatkan informan yang ingin diperoleh.

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar (Sugiyono, 2010:219).

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2006: 129). Adapun jenis dan sumber data dari penelitian ini adalah:

3.4.1 Jenis Data

1. Jenis data primer

a. *Person*

Yaitu individu atau perseorangan. Sumber data yang bisa memberikan data berupa suatu jawaban lisan melalui wawancara atau dalam penelitian ini bisa disebut dengan informan. Peneliti disini akan melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Masyarakat Desa dan Bendahara Desa yaitu tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Mendorong Transparansi Anggaran Desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

b. *Place*

Yaitu sesuatu yg dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan, dan sebagainya); wadah, ruang (bidang, rumah, dan sebagainya) yang tersedia untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini yang berkaitan dengan tempat atau

tentang kondisi yang berlangsung dan berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu mengamati tingkat partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

c. *Paper*

yaitu sumber data yang menyajikan data berupa huruf-huruf, angka, gambar dan simbol-simbol yang lain. Data ini bisa diperoleh dari buku administrasi kantor, data demografi, data struktur organisasi di Desa Madaprama dan data di Kantor Pemerintahan Desa. Serta beberapa dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari kantor desa tersebut.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data terkait dengan dari siapa, apa, dan dari mana informan mengenai fokus penelitian diperoleh. Dengan kata lain sumber data berkaitan dengan lokasi dan satuan penelitian atau observation unit. Jadi sumber merupakan asal-usul dari apa, siapa, dari mana data diperoleh (Muhammad, 2011:154).

Tabel 2.1 Sumber Data

No	Jenis Data	Keterangan
1	Primer	Kepala Desa, Masyarakat Desa dan Bendahara Desa di Desa Madaprama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.
2	Sekunder	Media, Buku, Catatan atau Arsip dan berkunjung ke perpustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sebuah urutan informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan problem tertentu. Menurut (Burhan Bungin, 2011:69) “data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang dapat diperoleh dilokasi penelitian”. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Pada bagian ini, peneliti menentukan metode apa yang akan digunakan dalam merekam dan mengumpulkan seluruh data penelitian. Penentuan metode pengumpulan data harus relevan dengan masalah penelitian dan karakteristik sumber data serta bagaimana alasan-alasan rasional mengapa metode pengumpulan data itu digunakan.

Menurut (Hadi, 1990:136) Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara

Wawancara menurut (Sugiyono, 2009:74) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap

muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dengan wawancara akan mendapatkan informasi respon dari responden. Sedangkan model wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin, yaitu tanya jawab menggunakan kerangka pertanyaan sebagai pedoman umum tanya jawab kedua belah pihak mempunyai peranan berbeda. Dalam penelitian pelaksanaan ini, penelitian menggunakan wawancara bebas atau wawancara tidak struktur, karena penelitian beranggapan metode ini sangat tepat dilakukan untuk menciptakan suasana wawancara yang santai, dengan harapan responden akan menjelaskan semua data yang peneliti butuhkan tanpa menutup-menutupi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dengan demikian teknik atau metode observasi ini dilakukan untuk mengetahui lebih dekat tentang objek yang diteliti. Pedoman observasi merupakan alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data-data melalui pengamatan dan pendekatan yang sistematis terhadap beberapa hal tentang objek penelitian.

Ditinjau dari kerangka perencanaan terhadap obyek yang diamati, maka peneliti menggunakan metode observasi sistematis. Observasi sistematis yaitu

observasi dengan melakukan perencanaan dan perumusan materi yang akan diamati sebagai pedoman pelaksanaan observasi.

Pada metode observasi ini, peneliti ikut melibatkan diri pada kegiatan partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa dan agar peneliti dapat melakukan pengamatan secara mendalam. Sedangkan observasi sistematis, peneliti lakukan dengan membuat perencanaan kondisi-kondisi yang akan peneliti amati dari observasi ini peneliti mendapatkan gambaran umum mengenai partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi anggaran desa di Desa Madaprama serta bagaimana peranan Pemerintah Desa Madaprama dalam meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan kegiatan pemerintah desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut (Suharsimi Arikunto, 2002: 231) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti dan sebagainya. Teknik ini digunakan sebagai bukti wawancara dan observasi terhadap sumber data serta data-data yang diperoleh dari penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2013: 244)

Menurut (Milles dan Huberman, 1992: 16) analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. (Afifuddin, 2012: 159)

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman (Dalam sugiyono, 2014: 249) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat Naratif. Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matrik atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi yang demikian ini akan memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Data

Catatan yang diambil dari berbagai sumber yang ada dan dari hasil-hasil observasi dapat disimpulkan masalah-masalah yang sesuai dengan fokus

penelitian penulis. Metode yang penulis gunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah induktif. Metode induktif adalah metode yang dinilai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak kearah pembentukan kesimpulan kategori atau ciri-ciri umum tertentu.

Dengan demikian metode induktif merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkannya menjadi suatu teori. Dimana data yang berhasil peneliti kumpulkan dari lokasi penelitian, selanjutnya dianalisa dan kemudian disajikan secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari Pemerintah Desa. Penerapannya adalah dengan cara mengolah data yang masih umum yang berupa jawaban dari Kepala Desa, Masyarakat, dan Bendaha Desa di Desa Madaprana, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut *Milles and Hiberman* adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan ditahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *Credibale*.

3.7 Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007: 29).

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007: 29).

